



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU
HEBAT!**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagai tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Putussibau, Oktober 2022
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs.H.ABDURRASYID,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630807 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematik Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...	8
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	38
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Kapuas Hulu	9
2.2	Tabel Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu	40
3.2	Tabel Program dan Kegiatan	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan pangan dapat lebih optimal.
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan pertanian dan pangan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pangan untuk memenuhi



ketersediaan pangan. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2022 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2023.

3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021 – 2026.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Pangan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Draf usulan program pembangunan pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;



3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Program dan Kegiatan



Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan rumusan tentang program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2022 dengan APBD sebesar Rp 43.326.297.157,- yang terdiri dari 10 program, 25 kegiatan dan 59 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 42.500.246.874,- dengan capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,09%.

Adapun hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 telah memenuhi target yang direncanakan. Akan tetapi masih terdapat program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan juga terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Dan Pangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							2022	2020	Target Renja Perangk at Daerah tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan energi perkapita	70%	67%	69%	69%	100%	70%	70%	100%
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	70%	67%	69%	69%	100%	70%	70%	100%
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%



2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AGK	78%	72%	75%	75%	100%	78%	78%	100%
2	09	03	2.04	02	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100%	15 keg	15 keg	100%
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	87,5	77,50	78,09	78,09	100%	87,5	87,5	100%
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2	09	04	2.01	01	- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	80%	75%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi	10 Jenis	7 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
2	09	05	2.01	05	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Tipe tes Kit	5 Tipe tes Kit	5 Tipe tes Kit	5 Tipe tes Kit	100%	5 Tipe tes Kit	5 Tipe tes Kit	100%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	BB	B	BB	BB	100%	BB	BB	100%



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

						Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Meningkatnya kualitas kondisi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100%	26 dok	26 dok	100%
3	27	01	2.01	01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
3	27	1	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%



3	27	01	2.01	03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
3	27	1	2.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
3	27	01	2.01	05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok'	2 dok'	2 dok'	2 dok'	100%	2 dok'	2 dok'	100%
3	27	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
3	27	1	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100%	26 dok	26 dok	100%
3	27	1	2.02	1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 orang	144 orang	144 orang	144 orang	100%	144 orang	144 orang	100%
3	27	01	2.02	03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
3	27	01	2.02	05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%



3	27	01	2.02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	100%	16 dok	16 dok	100%
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
3	27	01	2.03	04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
3	27	01	2.03	05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 dok	6 dok	5 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
3	27	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket		1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
3	27	01	2.05	03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	100%	17 kegiatan	17 kegiatan	100%
3	27	01	2.06	01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	100%	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	100%
3	27	1	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket kegiatan	3 paket kegiatan	3 paket kegiatan	3 paket kegiatan	100%	3 paket kegiatan	3 paket kegiatan	100%



3	27	1	2.06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	100%	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	100%
3	27	1	2.06	05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	100%	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	100%
3	27	01	2.06	06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
3	27	1	2.06	08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
3	27	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3	27	01	2.06	11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	0	0	0	100%	4 unit	4 unit	100%
3	27	01	2.07	01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	0	0	100%	1 unit	1 unit	100%
3	27	01	2.07	11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	0	100%	3 unit	3 unit	100%
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
3	27	1	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
3	27	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%



3	27	01	2.08	03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
3	27	1	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
3	27	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
3	27	1	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
3	27	1	2.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian	150 kelompok	150 kelompok	150 kelompok	150 kelompok	100%	150 kelompok	150 kelompok	100%
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	80%	80%	78%	80%	100%	80%	80%	100%
3	27	02	2.01	01	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	02	2.01	02	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%



3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	74%	74%	70%	74%	100%	74%	74%	100%
3	27	02	2.02	02	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	02	2.02	03	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	76%	76%	74%	76%	100%	76%	76%	100%
3	27	02	2.03	01	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	02	2.03	02	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	100%	5 unit usaha	5 unit usaha	100%
3	27	02	2.04	01	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	74%	74%	70%	74%	100%	74%	74%	100%
3	27	02	2.05	03	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	100%	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	100%
3	27	02	2.05	06	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%



3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
3	27	02	2.06	01	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	100%	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	100%
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	75%	75%	72%	75%	100%	75%	75%	100%
3	27	03	2.01	03	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	70%	70%	68%	70%	100%	70%	70%	100%
3	27	03	2.02	01	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	15 buah	15 buah	15 buah	15 buah	100%	15 buah	15 buah	100%
3	27	03	2.02	02	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	100%	1 buah	1 buah	100%
3	27	03	2.02	03	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	110 buah	110 buah	110 buah	110 buah	100%	110 buah	110 buah	100%
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	100%	0 buah	0 buah	100%
3	27	03	2.02	09	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	100%	5 buah	5 buah	100%



3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5%	3%	5%	5%	100%	5%	5%	100%
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	80%	75%	78%	80%	100%	80%	80%	100%
3	27	04	2.01	01	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23 kecamatan	23 kecamatan	23 kecamatan	23 kecamatan	100%	23 kecamatan	23 kecamatan	100%
3	27	04	2.01	03	- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23 kecamatan	23 kecamatan	23 kecamatan	23 kecamatan	100%	23 kecamatan	23 kecamatan	100%
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	04	2.02	02	- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	23 kecamatan	23 kecamatan	23 kecamatan	23 kecamatan	100%	23 kecamatan	23 kecamatan	100%
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
3	27	04	2.04	01	- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	20 kegiatan	100%
3	27	04	2.04	02	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan	100%	23 kegiatan	23 kegiatan	100%
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	75%	75%	72%	75%	100%	75%	75%	100%
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	75%	75%	72%	75%	100%	75%	75%	100%



3	27	05	2.01	01	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23 ha	23 ha	23 ha	23 ha	100%	23 ha	23 ha	100%
3	27	05	2.01	03	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23 ha	23 ha	23 ha	23 ha	100%	23 ha	23 ha	100%
3	27	05	2.01	05	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23 ha	23 ha	23 ha	23 ha	100%	23 ha	23 ha	100%
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	100%	1 perusahaan	1 perusahaan	100%
3	27	06	2.01	03	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	19 Izin Usaha Pertanian	19 Izin Usaha Pertanian	19 Izin Usaha Pertanian	19 Izin Usaha Pertanian	100%	19 Izin Usaha Pertanian	19 Izin Usaha Pertanian	100%
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani tingkat madya	0,43%	0,40%	0,43%	0,43%	100%	0,43%	0,43%	100%
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok	1503 orang	1468 orang	1503 orang	1503 orang	100%	1503 orang	1503 orang	100%
3	27	07	2.01	01	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 kelembagaan	14 kelembagaan	14 kelembagaan	14 kelembagaan	100%	14 kelembagaan	14 kelembagaan	100%
3	27	07	2.01	02	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 kelembagaan	10 kelembagaan	10 kelembagaan	10 kelembagaan	100%	10 kelembagaan	10 kelembagaan	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	√	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98	4,98		5,38	5,58	
	1 . Skor PPH	-	√	69,56	72	74	76	78	80	68,15		74	76	
	2 . Jumlah Produksi Pertanian	-	√											
	Padi Sawah (Ton)	-	√	25.346	26.119	28.919	31.919	34.819	38.319	59.121,48		28.919	31.919	
	Padi Ladang (Ton)	-	√	29.506	30.661	33.434	36.789	40.144	43.499			33.434	36.789	
	Jagung (Ton)	-	√	263,81	1.126	1.132	1.141	1.201	1.215	3.279,47		1.132	1.141	
	Ubi Kayu (Ton)	-	√	8.678,18	18.625	18.862	19.981	22.493	25.721	11.524,94		18.862	19.981	
	Cabe (Ton)	-	√	230,52	236,29	242,19	248,25	254,45	260,82	234,12		242,19	248,25	
	Bawang Merah (Ton)	-	√	3,65	3,71	3,76	3,82	3,88	3,94	0,2		3,76	3,82	
	Jahe (Ton)	-	√	179,79	184,28	188,89	193,61	198,45	203,41			188,89	193,61	



		Sapi (Kilo)	-	√	140.537,00	161.873,08	161.921,64	161.970,22	162.018,81	162.067,42	121.863		161.921,64	161.970,22	
		Kambing (Kilo)	-	√	2.983,00	3.994,20	3.995,40	3.996,59	3.997,79	3.998,99	3.951		3.995,40	3.996,59	
		Babi (Kilo)	-	√	123.468,00	132.103,62	132.143,25	132.182,90	132.222,59	132.262,22	77.027		132.143,25	132.182,90	
		Ayam Ras Potong (Kilo)	-	√	983.439,00	1.222.458,56	1.222.825,39	1.222.559,19	1.223.559,19	1.223.926,26	1.572.418		1.222.825,39	1.222.559,19	
		Ayam Buras (Kilo)	-	√	11.474,00	83.230,96	83.255,93	83.280,91	83.305,89	83.330,89	54.263		83.255,93	83.280,91	
		Itik (Kilo)	-	√	743	978,29	978,59	978,88	979,19	979,47	1.977		978,59	978,88	
		Itik Manila (Kilo)	-	√	2.573,26	2.573,77	2.574,54	2.575,32	2.576,09	2.576,86			2.574,54	2.575,32	
		Telur Ayam (Kilo)	-	√	23.619,84	25.981,82	28.580,01	31.438,01	34.581,81	5.978,90			28.580,01	31.438,01	
		Telur Itik (Kilo)	-	√	4.083,67	4.492,04	4.941,24	5.435,37	38.039,99	6.576,79			4.941,24	5.435,37	
		Kelapa Sawit (Ton)	-	√	800.867	303.801	318.991	334.940	351.687	369.272	519.531,17		318.991	334.940	
		Karet (Ton)	-	√	19.218	12.800	12.850	12.900	12.950	13.000	12.681		12.850	12.900	
		Kopi (Ton)	-	√	7	1,7	1,8	1,9	2	2,1	1,22		1,8	1,9	
		Lada (Ton)	-	√	12,21	12,8	12,9	13	13,2	13,5	12,1		12,9	13	
2		Predikat SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu	-	√	B	BB	BB	BB	BB	A	BB		BB	BB	
	1	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu	-	√	25,77	26	50	60	70	75			50	60	
	2	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu	-	√	BB	BB	BB	A	A	A	BB		BB	A	





2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan pertanian dan pangan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD

No.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Pertanian dan Pangan	Permasalahan
1.	Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Sistem penyediaan Database belum tertata dan kurang terpadu antar unit kerja, sehingga bahan untuk perumusan kebijakan kurang memadai.
2.	Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Pangan	Koordinasi dengan instansi vertikal sudah cukup baik, tetapi koordinasi internal di lingkup OPD masih lemah, sehingga menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Pangan	Manajemen internal di lingkup OPD baik manajemen organisasi, SDM maupun pengelolaan asset masih lemah, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.
4.	Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). 2. Cadangan pangan di tingkat pemerintah dan di tingkat rumah tangga belum terpantau. 4. Pemantauan dan penanganan penduduk rawan pangan belum maksimal. 5. Pola konsumsi pangan masyarakat belummenuhi target SPM. 6. Pemantauan dan pengendalian distribusi, harga dan pasokan bahan pangan belum terpadu dengan instansi terkait. 7. Cakupan pengawasan keamanan panganmasih perlu ditingkatkan.



5.	Penyelenggaraan urusan pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian2. Peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan terkendala penurunan luas lahan fungsional pertanian.3. Produk hasil pertanian masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas.4. Penjaminan kesehatan hewan dan produk Bahan Asal Hewan (BAH) mutlak dilakukan sebagai kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat.5. Keterbatasan sarana dan prasarana Produksi pertanian.
----	----------------------------------	--

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi terhadap SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2023 dengan predikat ‘BB’, yang mana masih perlu dilakukan perbaikan namun tidak bersifat mendasar. Kendala ini disebabkan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan masih belum dikendalikan dengan baik, belum mengacu pada target kinerja, keterbatasan pengetahuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan indikator kinerjanya, belum disusunnya pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan di Daerah.
2. Berkaitan dengan permasalahan Ketahanan Pangan masih ada kaitannya dengan permasalahan nasional, dimana sistem cadangan dan distribusi pangan serta rantai pasokan dan logistik nasional belum terintegrasi dengan baik, sementara jumlah produksi pertanian lokal masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan utama.
3. Berkaitan dengan upaya peningkatan produksi di sektor Pertanian masih mengalami kendala dalam penyediaan sarana produksi pertanian yang dapat menunjang proses teknologi budidaya, dimana kecenderungannya bantuan sarana produksi selalu datang diwaktu yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Kondisi Lahan Pertanian yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki kecenderungan dengan pola yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan. Sehingga kesulitan dalam memfasilitasi prasarana untuk menunjang produksi pertanian.



- 5. Dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Penyakit Hewan dan ternak masih mengalami kendala dan permasalahan dalam hal ketersediaan vaksin untuk mengatasi penyakit ternak yang menular dan beberapa kejadian luar biasa seperti Rabies. Selain itu juga keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bisa terlibat dalam menangani masalah penyakit ternak.
- 6. Masih terbatasnya/ belum tersedianya sarana pelayanan yang memenuhi standar hygiene-sanitasi (RPH-RPU) dan RPH yang ada belum bisa dimanfaatkan sehingga pengawasan kesmavet belum optimal.
- 7. Sumber daya manusia masih menjadi kendala dan permasalahan yang utama dalam memberikan pembinaan dan pendampingan. Jumlah Penyuluh pertanian yang ada masih belum bisa optimal dibandingkan dengan luas lahan pertanian.

2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Menggunakan Analisis SWOT

Isu-isu strategis tidak bisa terlepas dari keberhasilan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan yang telah dicapai hingga saat ini. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisa terhadap kondisi lingkungan internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness), serta memperhatikan kondisi eksternal berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis internal ini bertujuan untuk memetakan kekuatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam potensi pembangunan, serta mengenali dan memahami kelemahan dan kekurangan agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan, sedangkan Analisis eksternal untuk memetakan peluang dan ancaman yang akan dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan.

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut digunakan metode Analisis SWOT, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)

LINGKUNGAN INTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.	1. Kondisi Lahan pertanian yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan. 2. Pengaruh perubahan iklim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman.



<div>2. Adanya Komitmen Pimpinan untuk Peningkatan Produksi Sektor Pertanian.</div> <div>3. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pertanian dan Pangan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN</div> <div>4. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.</div> <div>5. Tersedianya Komoditas Unggulan di Sektor Pertanian.</div>	<div>3. Penanganan desa rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat dilakukan secara efektif.</div> <div>4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan yang Lengkap, baik dan cenderung mahal.</div> <div>5. Kecenderungannya Masyarakat Belum dapat memanfaatkan lahan pertanian secara optimal.</div> <div>6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bandingkan Ruang Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan yang luas dan beragam.</div> <div>7. Pertumbuhan Produksi yang Masih Fluktuatif.</div> <div>8. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang berkualitas.</div>
--	---

LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
<div>1. Potensi areal Pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu untuk Perluasan Areal Pertanian.</div> <div>2. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan instansi - instansi vertikal terkait serta mitra kerja (petani, pelau agribisnis, penyedia saprodi, dll).</div> <div>3. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk.</div> <div>4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat.</div> <div>5. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian masih terbuka luas.</div>	<div>1. Penurunan Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian.</div> <div>2. Alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian produktif oleh berbagai kepentingan.</div> <div>3. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) seperti hama dan penyakit.</div> <div>4. Dampak dari perubahan iklim yang menimbulkan potensi bencana alam seperti banjir.</div> <div>5. Kemandirian petani yang masih rendah dimana pola pikir petani masih berorientasi bantuan sehingga sulit untuk mandiri serta Sulitnya petani menerima inovasi dan</div>



6. Adanya inovasi teknologi dan informasi untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian.	teknologi pertanian.
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian.	6. Rendahnya minat generasi muda untuk bertani.
8. Dukungan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan APBN.	

Berdasarkan Analisis SWOT dengan Faktor Internal dan Eksternal yang sudah diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Startegis S – O yaitu strategis yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang.
2. Strategis W – O yaitu strategis yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang.
3. Strategis S – T yaitu strategis yang menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman.
4. Strategis W – T yaitu strategis yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman.

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal, maka dapat dituangkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.4
Strategis Faktor Analisis SWOT

STRATEGIS (S – O)	STRATEGIS (W – O)
1. Tanggung jawab dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan produksi sektor pertanian.	1. Pemanfaatan potensi lahan pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian yang baik dan berkualitas.
2. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan di sektor pertanian.	2. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal yang disebabkan perubahan iklim terhadap peningkatan hasil pertanian.
3. Optimalisasi kebutuhan pangan masyarakat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya bahan pangan sehat.	3. Penanganan penurunan jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Peningkatkan inovasi teknologi dan informasi baru bagi petani dalam meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian.	4. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Pertanian.
	5. Meningkatkan kualiatas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan



5. Optimalisasi ketersediaan dana yang diperoleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan.	pentingnya mengkonsumsi bahan pangan sehat, serta membuka peluang pasar di bidang pertanian. 6. Peningkatan jumlah produksi sektor pertanian.
STRATEGIS (S – T)	STRATEGIS (W – T)
1. Penerapan inovasi dan teknologi informasi yang baru dengan dukungan dari pemerintah dalam menunjang kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan. 2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian untuk hasil pertanian yang bermutu dan berdaya saing. 3. Pembukaan lapangan kerja disektor pertanian sehingga dapat menumbuhkan minta masyarakat maupun generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian. 4. Mewujudkan kemandirian petani agar dapat berswasembada yang berkelanjutan. 5. Pengendalian terhadap serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) agar tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.	1. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal yang disebabkan perubahan iklim terhadap peningkatan hasil produksi/produktivitas pertanian. 2. Optimalisasi serangan OPT dan kondisi perubahan iklim yang menimbulkan potensi bencana seperti banjir, hama dan penyakit. 3. Peningkatan kesejahteraan petani. 4. Pemberdayaan dan penanggulangan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan. 5. Pembukaan lapangan kerja disektor pertanian sehingga dapat menumbuhkan minta masyarakat maupun generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “Kerangka Regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : MUSRENBANGPROP di tingkat Propinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kota, MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG tingkat Desa dan MUSRENBANGNAS di tingkat Daerah, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan;

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan Pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya;

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.





2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Kapuas Hulu	Persentase ketersediaan energi perkapita	72	%	Rp 402.479.726	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Kapuas Hulu	Persentase ketersediaan energi perkapita	72	%	Rp 157.360.000
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	72	%	Rp 171.615.840	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	72	%	Rp 86.350.000
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	dok	Rp 44.004.840	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	dok	Rp 14.000.000
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	keg	Rp 127.611.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	keg	Rp 72.350.000



	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	78	%	Rp	230.863.886	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	78	%	Rp	71.010.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18	kegiatan	Rp	230.863.886	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18	kegiatan	Rp	71.010.000
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	100	%	Rp	75.381.075	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	100	%	Rp	24.000.000
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1	dok	Rp	75.381.075	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1	dok	Rp	24.000.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	dok	Rp	75.381.075	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	dok	Rp	24.000.000
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	82	%	Rp	28.041.497	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	82	%	Rp	28.990.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi	10	jenis	Rp	28.041.497	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi	10	jenis	Rp	28.990.000



	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Tipe Test Kit	Rp 28.041.497	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Tipe Test Kit	Rp 28.990.000
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	NILAI SAKIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	87,5	Nilai	Rp 20.374.422.283	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	PREDIKAT SAKIP	87,5	Nilai	Rp 21.650.329.580
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	Rp 221.436.050				100	%	Rp 200.000.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	Rp 14.510.787.793				100	%	Rp 16.720.941.340
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	Rp 39.293.540				100	%	Rp 11.692.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	Rp 25.449.600				100	%	Rp 70.000.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	100	%	Rp 547.500.800				100	%	Rp 1.048.803.400



		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp 2.100.000.000				100	%	Rp 177.570.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	%	Rp 2.668.376.700				100	%	Rp 2.712.497.840
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas kondisi Barang Milik Daerah	100	%	Rp 261.577.800				100	%	Rp 708.825.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	dok	Rp 221.436.050	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	NILAI SAKIP	26	dok	Rp 200.000.000
	Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	71.311.350	Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	68.636.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	14.730.540	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	4.972.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	5.815.260	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	4.016.000



	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	11.853.160	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	4.856.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	12.061.280	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	4.078.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	28.222.040	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	37.212.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	77.442.420	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	76.229.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	dok	Rp 14.510.787.793	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	dok	Rp 16.720.941.340
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	Rp 13.969.513.653	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	Rp 16.209.816.740
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	8	dok	Rp 472.011.320	- Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	8	dok	Rp 452.020.000



	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Keuangan SKPD			
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	Rp 34.674.244	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	Rp 27.407.800
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	dok	Rp 34.588.576	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	dok	Rp 31.696.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	dok	Rp 39.293.540	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	dok	Rp 11.692.000
	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 9.306.110	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 6.157.000
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 29.987.430	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 5.535.000



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	dok	Rp 25.449.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	dok	Rp 70.000.000
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dok	Rp 25.449.600	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dok	Rp 70.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	17	kegiatan	Rp 547.500.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	15	kegiatan	Rp 1.048.803.400
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket kegiatan	Rp 15.284.720	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket kegiatan	Rp 5.705.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	Rp 163.350.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	Rp 124.060.000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	Rp 49.699.540	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	Rp 17.587.400
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	Rp 26.012.580	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	Rp 13.334.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dok	Rp 28.314.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	Rp -



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	Rp 47.190.000	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	Rp 12.000.000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	Rp 209.179.960	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	Rp 865.656.000
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	dok	Rp 8.470.000	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	dok	Rp 10.461.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	kegiatan	Rp 2.100.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	kegiatan	Rp 177.570.000
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Rp 100.000.000	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Rp 36.670.000
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	Rp 2.000.000.000	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	Rp 140.900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	laporan	Rp 2.668.376.700		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	laporan	Rp 2.712.497.840



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	Rp 3.630.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	Rp 3.000.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	Rp 203.062.200	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	Rp 182.688.000
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 12.160.500	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	Rp -
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 2.449.524.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 2.526.809.840
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Unit	Rp 261.577.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Unit	Rp 708.825.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	Rp 180.507.800	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	Rp 292.805.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	Rp 21.780.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	Rp 9.420.000



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp 59.290.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp 406.600.000
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian	160	kelompok	Rp 13.469.450.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian	160	kelompok	Rp 985.258.800
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	82	%	Rp 140.800.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	82	%	Rp 396.600.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	kegiatan	Rp 71.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	kegiatan	Rp 389.600.000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	kegiatan	Rp 69.800.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	kegiatan	Rp 7.000.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	75	%	Rp 11.373.700.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	75	%	Rp 78.956.000



	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp 11.000.000.000	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp 52.756.000
	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp 373.700.000	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	kegiatan	Rp 26.200.000
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	78	%	Rp 178.750.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	78	%	Rp 17.456.200
	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	kegiatan	Rp 89.375.000	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	kegiatan	Rp 9.336.500
	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	kegiatan	Rp 89.375.000	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	kegiatan	Rp 8.119.700
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	7	unit usaha	Rp 25.000.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	7	unit usaha	Rp 2.138.000
	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang	1	kegiatan	Rp 25.000.000	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang	1	kegiatan	Rp 2.138.000



			Beredar						Beredar			
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	78	%	Rp 101.200.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	78	%	Rp -
	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	jenis	Rp 50.600.000	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	-	-	Rp -
	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 kegiatan	toko	Rp 50.600.000	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	-	-	Rp -
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	51	%	Rp 1.650.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	51	%	Rp 490.108.600
	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	ekor	Rp 1.650.000.000	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	ekor	Rp 490.108.600



6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	100	%	Rp 39.757.199.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	100	%	Rp 16.776.282.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	78	%	Rp 616.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	78	%	Rp 140.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	kegiatan	Rp 616.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	kegiatan	Rp 140.000.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	72	%	Rp 39.141.199.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	72	%	Rp 16.636.282.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	16	buah	Rp 7.250.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	16	buah	Rp 1.177.501.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	buah	Rp 7.397.100.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	Rp -
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	120	buah	Rp 22.694.099.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	120	buah	Rp 14.793.830.000



	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	buah	Rp 200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	Rp -
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8	buah	Rp 1.600.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8	buah	Rp 664.951.000
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	%	Rp 394.500.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	%	Rp 106.557.000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	81	%	Rp 244.500.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	81	%	Rp 56.573.000
	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	kecamatan	Rp 134.500.000	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	kecamatan	Rp 30.015.000
	- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23	kecamatan	Rp 110.000.000	- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23	kecamatan	Rp 26.558.000



	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100	%	Rp 60.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot	Kab. Kapuas Hulu	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100	%	Rp 11.226.000
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	23	kegiatan	Rp 60.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	23	kegiatan	Rp 11.226.000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	3	unit	Rp 90.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	3	unit	Rp 38.758.000
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	kegiatan	Rp 50.000.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	kegiatan	Rp 27.118.000
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	kegiatan	Rp 40.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	kegiatan	Rp 11.640.000
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	77	%	Rp 745.500.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	77	%	Rp 86.034.200
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	77	%	Rp 745.500.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	77	%	Rp 86.034.200



	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	Ha	Rp	249.500.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	Ha	Rp	12.214.000
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	Ha	Rp	255.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	Ha	Rp	66.620.200
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	Ha	Rp	241.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	Ha	Rp	7.200.000
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100	%	Rp	372.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100	%	Rp	76.009.800
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1	perusahaan	Rp	372.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1	perusahaan	Rp	76.009.800



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	kegiatan	Rp 372.000.000	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	kegiatan	Rp 76.009.800	
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kelompok tani tingkat madya	0,44	%	Rp 360.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kelompok tani tingkat madya	0,44	%	Rp 529.000.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan bina kelompok	1538	orang	Rp 360.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan bina kelompok	1538	orang	Rp 529.000.000	
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	kelembagaan	Rp 260.000.000	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	kelembagaan	Rp 428.110.000	
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	kelembagaan	Rp 100.000.000	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	kelembagaan	Rp 100.890.000	
						Rp 75.978.973.581							Rp 40.419.821.380





2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Kapuas Hulu harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat.

Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023. Kegiatan – kegiatan yang diusulkan mengarah pada program – program prioritas yaitu Program Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara hirarki, rumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi dan masalah spesifik lokal. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat komplementer, suplementer, dan integratif.

Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Kabupaten Kapuas Hulu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan

3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pertanian Pangan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka misi yang didukung capaiannya adalah :

1. Misi Nomor 2 yaitu “Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi”.
2. Misi Nomor 4 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas



Adapun tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Rencana Strategis yang disusun untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga tercapainya tujuan untuk mendukung sasaran pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (Lima) tahun periode 2021 - 2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.

Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat ditabel 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah		LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Persen	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
	1.1	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	1.	Skor PPH	Angka	69,56	72	74	76	78	80
			2.	Jumlah Produksi Pertanian							
				Padi Sawah	Ton	25.346	26.119	28.919	31.919	34.819	38.319
				Padi Ladang	Ton	29.506	30.661	33.434	36.789	40.144	43.499
				Jagung	Ton	263,81	1.126	1.132	1.141	1.201	1.215
				Ubi Kayu	Ton	8.678,18	18.625	18.862	19.981	22.493	25.721
				Cabe	Ton	230,52	236,29	242,19	248,25	254,45	260,82
				Bawang Merah	Ton	3,65	3,71	3,76	3,82	3,88	3,94
				Jahe	Ton	179,79	184,28	188,89	193,61	198,45	203,41
				Sapi	Kilo	140.537,00	161.873,08	161.921,64	161.970,22	162.018,81	162.067,42
				Kambing	Kilo	2.983,00	3.994,20	3.995,40	3.996,59	3.997,79	3.998,99
				Babi	Kilo	123.468,00	132.103,62	132.143,25	132.182,90	132.222,59	132.262,22
				Ayam ras potong	Kilo	983.439,00	1.222.458,56	1.222.825,39	1.222.559,19	1.223.559,19	1.223.926,26
				Ayam Buras	Kilo	11.474,00	83.230,96	83.255,93	83.280,91	83.305,89	83.330,89
				Itik	Kilo	743,00	978,29	978,59	978,88	979,19	979,47
				Itik manila	Kilo	2.573,26	2.573,77	2.574,54	2.575,32	2.576,09	2.576,86
				Telur Ayam	Kilo	23.619,84	25.981,82	28.580,01	31.438,01	34.581,81	5.978,90
				Telur Itik	Kilo	4.083,67	4.492,04	4.941,24	5.435,37	38.039,99	6.576,79
				Kelapa Sawit	Ton	800.867	303.801	318.991	334.940	351.687	369.272
				Karet	Ton	19.218	12.800	12.850	12.900	12.950	13.000



				Kopi	Ton	7	1,7	1,8	1,9	2	2,1
				Lada	Ton	12,21	12,8	12,9	13	13,2	13,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Predikat SAKIP Kabupaten KapuasHulu	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	A
	2.1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	1.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Nilai	25,77	26	50	60	70	75
			2.	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu khususnya dalam pencapaian peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian untuk tahun 2023. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dengan melalui peningkatan produksi hasil pertanian.

Tujuan terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian memiliki sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan melalui 9 program dan 16 kegiatan yang diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - 1.2 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 1.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota



4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

1.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

1.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

1.2.2 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

1.3 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

1.4 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

1.1.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

1.5 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

1.6 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

1.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

1.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

1.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

1.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya



6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - 1.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - 1.3 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian
 - 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sasaran 2: Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana.



Untuk mencapai sasaran 2 diarahkan pada peningkatan nilai reformasi birokrasi dan predikat SAKIP yang mana untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan melalui 1 program dan 8 kegiatan yang diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Program ini dijabarkan kedalam kegiatan yang diantaranya :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"
- 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.1.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.1.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- 1.1.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.1.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.1.8 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder terkait.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 yang termuat pada lampiran.



Tabel 5.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2023				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan energi perkapita	Kab. Kapuas Hulu	72	%	Rp 402.479.726	APBD		75	%	Rp 438.427.226
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	Kab. Kapuas Hulu	72	%	Rp 171.615.840	APBD		75	%	Rp 184.476.951
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp 44.004.840	APBD		1	dok	Rp 44.104.851
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	1	keg	Rp 127.611.000	APBD		1	keg	Rp 140.372.100
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	Kab. Kapuas Hulu	78	%	Rp 230.863.886	APBD		80	%	Rp 253.950.275
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Kapuas Hulu	18	kegiat an	Rp 230.863.886	APBD		20	kegiat an	Rp 253.950.275

Halaman | 60



						Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 221.436.050	APBD		100	%	Rp 243.579.655
						Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 14.510.787.793	APBD		100	%	Rp 14.564.915.207
						Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 39.293.540	APBD		100	%	Rp 43.222.894
						Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 102.949.600	APBD		100	%	Rp 105.494.560
						Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 547.500.800	APBD		100	%	Rp 602.250.880
						Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 2.100.000.000	APBD		100	%	Rp 2.300.000.000
						Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 2.668.376.700	APBD		100	%	Rp 2.935.214.370
						Meningkatnya kualitas kondisi Barang Milik Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 261.577.800	APBD		100	%	Rp 222.516.580
3	27	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	26	dok	Rp 221.436.050	APBD		26	dok	Rp 243.579.655



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

3	27	01	2.01	01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	71.311.350	APBD	8	dok	78.442.485
3	27	1	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	14.730.540	APBD	1	dok	16.203.594
3	27	01	2.01	03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	5.815.260	APBD	1	dok	6.396.786
3	27	1	2.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	11.853.160	APBD	2	dok	13.038.476
3	27	01	2.01	05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	12.061.280	APBD	2	dok	13.267.408
3	27	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	28.222.040	APBD	4	dok	31.044.244
3	27	1	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	77.442.420	APBD	8	dok	85.186.662
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	26	dok	Rp 14.510.787.793	APBD	26	dok	Rp 14.564.915.207



3	27	1	2.02	1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	144	Orang	Rp	13.969.513.653	APBD		144	Orang	Rp	13.969.513.653
3	27	01	2.02	03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	Rp	472.011.320	APBD		8	dok	Rp	519.212.452
3	27	01	2.02	05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp	34.674.244	APBD		1	dok	Rp	38.141.668
3	27	01	2.02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	16	dok	Rp	34.588.576	APBD		16	dok	Rp	38.047.434
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	Rp	39.293.540	APBD		4	dok	Rp	43.222.894
3	27	01	2.03	04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	9.306.110	APBD		2	dok	Rp	10.236.721
3	27	01	2.03	05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	29.987.430	APBD		2	dok	Rp	32.986.173



3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	6	dok	Rp	102.949.600	APBD		6	dok	Rp	105.494.560
3	27	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	77.500.000	APBD		1	paket	Rp	77.500.000
3	27	01	2.05	03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	5	dok	Rp	25.449.600	APBD		5	dok	Rp	27.994.560
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	17	kegiatan	Rp	547.500.800	APBD		17	kegiatan	Rp	602.250.880
3	27	01	2.06	01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	paket kegiatan	Rp	15.284.720	APBD		2	paket kegiatan	Rp	16.813.192
3	27	1	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	3	paket	Rp	163.350.000	APBD		3	paket	Rp	179.685.000
3	27	1	2.06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	49.699.540	APBD		1	paket	Rp	54.669.494
3	27	1	2.06	05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	paket	Rp	26.012.580	APBD		2	paket	Rp	28.613.838
3	27	01	2.06	06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	28.314.000	APBD		2	dok	Rp	31.145.400
3	27	1	2.06	08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	47.190.000	APBD		1	laporan	Rp	51.909.000



3	27	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	laporan	Rp	209.179.960	APBD	2	laporan	Rp	230.097.956
3	27	01	2.06	11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	Rp	8.470.000	APBD	4	dok	Rp	9.317.000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	6	kegiatan	Rp	2.100.000.000	APBD	6	kegiatan	Rp	2.300.000.000
3	27	01	2.07	01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	Unit	Rp	100.000.000	APBD	1	Unit	Rp	100.000.000
3	27	01	2.07	11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	5	Unit	Rp	2.000.000.000	APBD	5	Unit	Rp	2.200.000.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	4	laporan	Rp	2.668.376.700	APBD	4	laporan	Rp	2.935.214.370
3	27	1	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	3.630.000	APBD	1	laporan	Rp	3.993.000
3	27	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	203.062.200	APBD	1	laporan	Rp	223.368.420



3	27	01	2.08	03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	12.160.500	APBD		1	laporan	Rp	13.376.550
3	27	1	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	2.449.524.000	APBD		1	laporan	Rp	2.694.476.400
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	12	Unit	Rp	261.577.800	APBD		12	Unit	Rp	222.516.580
3	27	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kapuas Hulu	5	Unit	Rp	180.507.800	APBD		5	Unit	Rp	198.558.580
3	27	1	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	5	Unit	Rp	21.780.000	APBD		5	Unit	Rp	23.958.000
3	27	1	2.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	2	Unit	Rp	59.290.000	APBD		2	Unit	Rp	65.219.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	160	kelompok	Rp	13.469.450.000	APBD		170	kelompok	Rp	14.801.025.000
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	Kab. Kapuas Hulu	82	%	Rp	140.800.000	APBD		85	%	Rp	154.880.000



3	27	02	2.01	01	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	71.000.000	APBD		1	kegiatan	Rp	78.000.000
3	27	02	2.01	02	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	69.800.000	APBD		1	kegiatan	Rp	76.880.000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp	11.373.700.000	APBD		75	%	Rp	12.495.700.000
3	27	02	2.02	02	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	11.000.000.000	APBD		1	kegiatan	Rp	12.100.000.000
3	27	02	2.02	03	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	373.700.000	APBD		1	kegiatan	Rp	395.700.000
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	Kab. Kapuas Hulu	78	%	Rp	178.750.000	APBD		80	%	Rp	196.625.000
3	27	02	2.03	01	- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	89.375.000	APBD		1	kegiatan	Rp	98.312.500
3	27	02	2.03	02	- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	89.375.000	APBD		1	kegiatan	Rp	98.312.500



3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	Kab. Kapuas Hulu	7	unit usaha	Rp	25.000.000	APBD		8	unit usaha	Rp	27.500.000
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp	25.000.000	APBD		1	kegiatan	Rp	27.500.000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	Kab. Kapuas Hulu	78	%	Rp	101.200.000	APBD		80	%	Rp	111.320.000
3	27	02	2.05	03	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Kab. Kapuas Hulu	3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	jenis	Rp	50.600.000	APBD		3000 Ekor Benih/Bibit Ternak	jenis	Rp	55.660.000
3	27	02	2.05	06	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kapuas Hulu	1 kegiatan	toko	Rp	50.600.000	APBD		1 kegiatan	toko	Rp	55.660.000
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	Kab. Kapuas Hulu	51	%	Rp	1.650.000.000	APBD		51	%	Rp	1.815.000.000
3	27	02	2.06	01	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	900 Ekor Benih/Bibit Ternak	ekor	Rp	1.650.000.000	APBD		900 Ekor Benih/Bibit Ternak	ekor	Rp	1.815.000.000



3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 39.757.199.000	APBD	100	%	Rp 45.813.722.000
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik	Kab. Kapuas Hulu	78	%	Rp 616.000.000	APBD	80	%	Rp 677.600.000
3	27	03	2.01	03	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	1	kegiatan	Rp 616.000.000	APBD	1	kegiatan	Rp 677.600.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	Kab. Kapuas Hulu	72	%	Rp 39.141.199.000	APBD	75	%	Rp 45.136.122.000
3	27	03	2.02	01	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	16	buah	Rp 7.250.000.000	APBD	17	buah	Rp 9.000.322.000
3	27	03	2.02	02	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	3	buah	Rp 7.397.100.000	APBD	4	buah	Rp 8.736.000.000
3	27	03	2.02	03	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	120	buah	Rp 22.694.099.000	APBD	125	buah	Rp 24.799.800.000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	1	buah	Rp 200.000.000	APBD	1	buah	Rp 200.000.000
3	27	03	2.02	09	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Kab. Kapuas Hulu	8	buah	Rp 1.600.000.000	APBD	12	buah	Rp 2.400.000.000



						Dipelihara										
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Kab. Kapuas Hulu	5	%	Rp 394.500.000	APBD	5	%	Rp 437.000.000	
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Kab. Kapuas Hulu	81	%	Rp 244.500.000	APBD	82	%	Rp 267.000.000	
3	27	04	2.01	01	-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	23	kecamatan	Rp 134.500.000	APBD	23	kecamatan	Rp 147.000.000	
3	27	04	2.01	03	-	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Kapuas Hulu	23	kecamatan	Rp 110.000.000	APBD	23	kecamatan	Rp 120.000.000	
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 60.000.000	APBD	100	%	Rp 65.000.000	
3	27	04	2.02	02	-	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	kegiatan	Rp 60.000.000	APBD	23	kegiatan	Rp 65.000.000	



3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	Kab. Kapuas Hulu	3	unit	Rp	90.000.000	APBD		4	unit	Rp	105.000.000
3	27	04	2.04	01	- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	20	kegiatan	Rp	50.000.000	APBD		22	kegiatan	Rp	60.000.000
3	27	04	2.04	02	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	kegiatan	Rp	40.000.000	APBD		23	kegiatan	Rp	45.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	Kab. Kapuas Hulu	77	%	Rp	745.500.000	APBD		79	%	Rp	755.600.000
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi	Kab. Kapuas Hulu	77	%	Rp	745.500.000	APBD		79	%	Rp	755.600.000
3	27	05	2.01	01	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Kapuas Hulu	23	Ha	Rp	249.500.000	APBD		23	Ha	Rp	256.000.000
3	27	05	2.01	03	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	23	Ha	Rp	255.000.000	APBD		23	Ha	Rp	235.500.000



3	27	05	2.01	05	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	Ha	Rp	241.000.000	APBD	23	Ha	Rp	264.100.000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	372.000.000	APBD	100	%	Rp	434.000.000
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	Kab. Kapuas Hulu	1	perusahaan	Rp	372.000.000	APBD	1	perusahaan	Rp	434.000.000
3	27	06	2.01	03	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Kapuas Hulu	19	izin usaha pertanian	Rp	372.000.000	APBD	19	izin usaha pertanian	Rp	434.000.000
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani tingkat madya	Kab. Kapuas Hulu	0,44	%	Rp	360.000.000	APBD	0,45	%	Rp	370.000.000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok	Kab. Kapuas Hulu	1538	orang	Rp	360.000.000	APBD	1699	orang	Rp	370.000.000
3	27	07	2.01	01	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	14	kelembagaan	Rp	260.000.000	APBD	14	kelembagaan	Rp	270.000.000
3	27	07	2.01	02	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	10	kelembagaan	Rp	100.000.000	APBD	10	kelembagaan	Rp	100.000.000



JUMLAH	Rp	76.056.473.581					Rp	84.182.135.276
--------	----	----------------	--	--	--	--	----	----------------





BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Pangan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2023, dimana Renja Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Putussibau, Oktober 2022
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs.H.ABDURRASYID,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630807 198910 1 001